



**IMPOR KEDELAI INDONESIA DARI AMERIKA SERIKAT
(ANALISIS EKONOMI POLITIK)**

***INDONESIAN SOYBEAN IMPORTS FROM UNITED STATES
(POLITICAL ECONOMY ANALYSIS)***

SKRIPSI

Oleh :

DEBBY CHINTIA PERMATA SARI

NIM : 100910101007

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**IMPOR KEDELAI INDONESIA DARI AMERIKA SERIKAT
(ANALISIS EKONOMI POLITIK)**

***INDONESIAN SOYBEAN IMPORTS FROM UNITED STATES
(POLITICAL ECONOMY ANALYSIS)***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh :

DEBBY CHINTIA PERMATA SARI

NIM : 100910101007

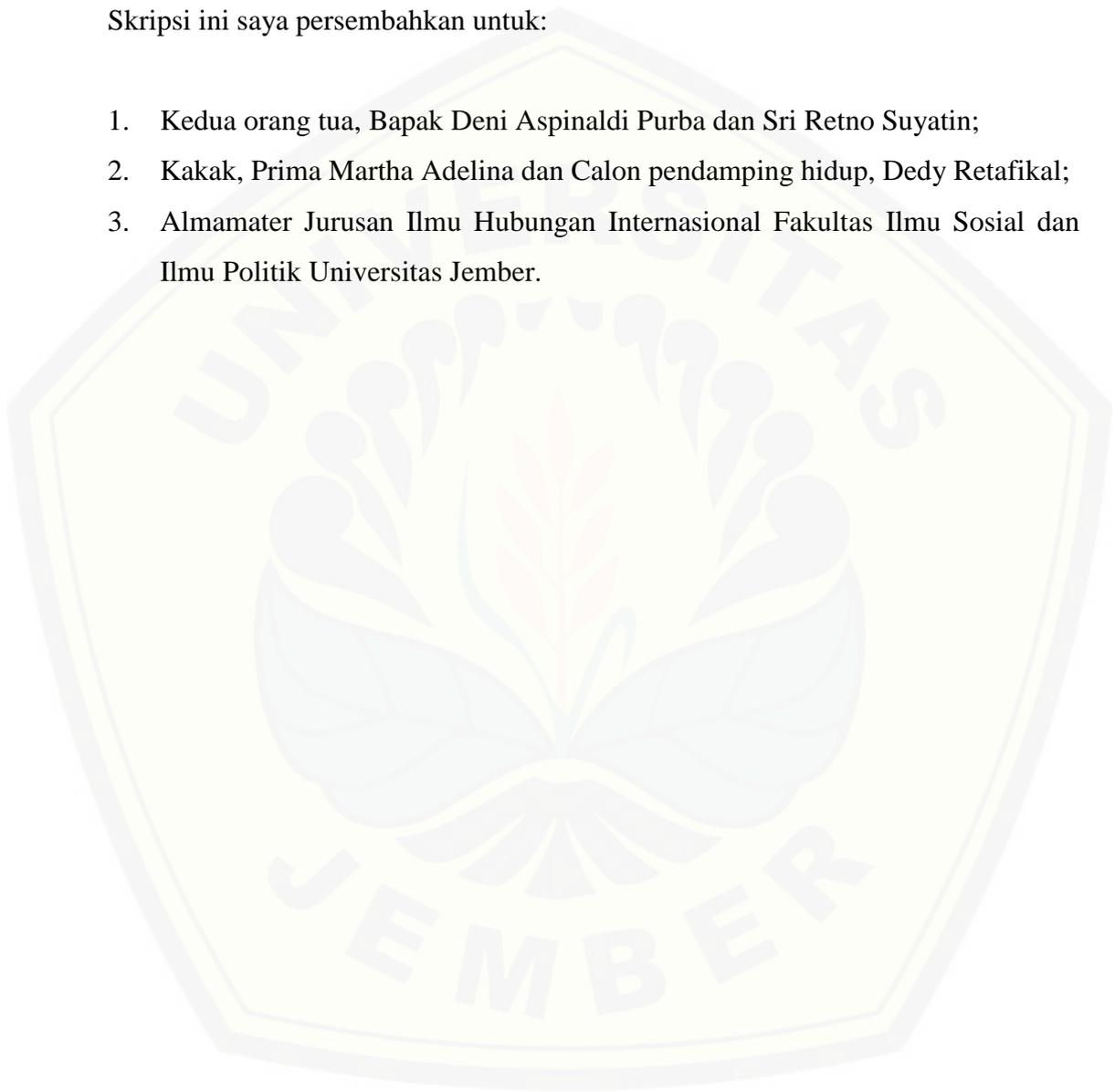
**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Deni Aspinaldi Purba dan Sri Retno Suyatin;
2. Kakak, Prima Martha Adelina dan Calon pendamping hidup, Dedy Retafikal;
3. Almamater Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTO

"The price of success is hard work, dedication to the job at hand, and the determination that whether we win or lose, we have applied the best of ourselves to the task at hand"

(Harga dari sebuah kesuksesan adalah kerja keras, dedikasi untuk pekerjaan yang dilakukan, dan tekad kuat yang menyatakan bahwa meskipun kita menang atau kalah, kita telah melakukan yang terbaik untuk tugas yang kita kerjakan)

By Vince Lombardi*

* BrainyQuote.com, Xplore Inc. 2016. *Vince Lombardi*.
<http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/v/vincelomba125250.html> diakses pada 20 Maret 2016

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Debby Chintia

NIM : 100910101007

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa karya ilmiah yang berjudul “Impor Kedelai Indonesia dari Amerika Serikat (Analisis Ekonomi Politik)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan yang telah disebutkan sumbernya. Karya ilmiah ini juga belum pernah diajukan pada instansi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Maret 2016

Yang menyatakan

Debby Chintia

NIM. 100910101007

SKRIPSI

**IMPOR KEDELAI INDONESIA DARI AMERIKA SERIKAT
(ANALISIS EKONOMI POLITIK)**

Oleh :

DEBBY CHINTIA P.S

100910101007

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Supriyadi, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Puji Wahono,MA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Impor Kedelai Indonesia Dari Amerika Serikat (Analisis Ekonomi Politik) telah diuji dan disahkan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 04 April 2016

Waktu : 09.00

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Dr. Sunardi Purwaatmoko, MIS
NIP 196010151989031002

Sekretaris I

Sekretaris II

Drs. Supriyadi, M.Si
NIP 195803171985031003

Dr. Puji Wahono, M.Si
NIP 196002011987021001

Anggota I

Anggota II

Drs. Pra Adi Sulistiyono, M. Si
NIP 196105151988021001

Honest Dody Molasy, S.sos, M. A
NIP 197611122003121002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Impor Kedelai Indonesia dari Amerika Serikat (Analisis Ekonomi Politik); Debby Chintia P.S; 100910101007; 2016; 101 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Meskipun Indonesia adalah negara agraris, namun sampai saat ini masih bergantung pada impor kedelai dari Amerika Serikat. Data dari BPS setiap tahunnya menunjukkan kebutuhan kedelai Indonesia mencapai 1 juta ton per tahun dengan rata-rata produktifitas kedelai hanya sebesar 1,19 ton per hektar dengan areal tanam kurang dari 5% dari total area pangan keseluruhan. Skripsi ini akan menganalisa dan menjawab pertanyaan mengapa Indonesia masih tergantung pada impor kedelai dari Amerika Serikat.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) untuk mendapatkan data-data berupa data sekunder dan kemudian dianalisa secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan penyebab mengalami ketergantungan impor kedelai dari Amerika Serikat karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah lemahnya kapabilitas sistem politik Indonesia dan faktor eksternal yaitu adanya liberalisasi sektor pertanian Indonesia. Kedua hal ini membuat produksi kedelai dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan kedelai setiap tahunnya.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Impor Kedelai Indonesia dari Amerika Serikat (Analisis Ekonomi Politik)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Supriyadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Puji Wahono, MA selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademi atas dorongan dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Bapak dan Ibu dosen dan staf karyawan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan;
4. Ayahanda Deni Aspinaldi Purba dan Ibunda Sri Retno S. ; Kakak Prima Martha, dan calon pendamping hidup Dedy Retafikal E.
5. Sahabat dan kawan-kawan Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember Angkatan 2009 sampai 2011 yang telah berbagi cerita, cinta, mimpi, serta harapan selama penulis menempuh pendidikan;
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi

kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 20 Maret 2016

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.2.1 Batasan Materi.....	6
1.2.1 Batasan Waktu.....	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kerangka Dasar Pemikiran	7
1.6 Argumen Utama	16
1.7 Metode Penelitian	16
1.7.1 Metode Pengumpulan Data.....	16
1.7.2 Metode Analisis Data.....	17
1.7.3 Pendekatan.....	18
1.8 Sistematika Penulisan	18
BAB II. GAMBARAN UMUM PERTANIAN DAN PANGAN DI INDONESIA	20

2.1	Gambaran Umum Pertanian Di Indonesia.....	20
2.2	Gambaran Umum Sektor Pangan Di Indonesia.....	25
2.3	Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pertanian Tahun 2008 – 2013.....	29
BAB III. KAPABILITAS POLITIK PEMERINTAH INDONESIA		
DALAM SEKTOR PANGAN TERUTAMA KEDELAI.....		32
3.1	Kapabilitas Ekstraktif (Extractive Capability).....	32
3.2	Kapabilitas Distributif (Distributive Capability).....	43
3.3	Kapabilitas Regulatif (Regulative Capability).....	49
3.4	Kapabilitas Responsif (Responsive Capability).....	52
3.5	Kapabilitas Simbolik (Symbolic Capability).....	55
3.6	Kapabilitas Domestik dan Internasional (Domestic and Internasional Capability).....	60
BAB IV. LIBERALISASI PERTANIAN DAN PANGAN DUNIA		
KHUSUSNYA DALAM SEKTOR PANGAN KEDELAI DI INDONESIA.....		66
4.1	Perjanjian Agricultural of Agreement dengan World Trade Organization.....	67
4.2	Penandatanganan Letter of Intent dengan International Monetary Funds (IMF).....	74
4.3	Faktor Pemilihan Impor Kedelai Asal Amerika Serikat.....	79
BAB V. KESIMPULAN.....		84
DAFTAR PUSTAKA.....		85

DAFTAR TABEL

2.1	Total Lahan Pertanian di Indoneisa Tahun 2009-2013.....	22
2.2	Kontribusi Subsektor Terhadap PDB Pertanian Tahun 2004 - 2012.....	23
2.3	Laju kinerja Sektor Pangan Produktif di Indonesia 2010-2012.....	25
2.4	Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Strategis, Tahun 2008-2012.....	26
3.1	Tabel Produksi, Kebutuhan Dalam Negeri, Impor, Luas Panen, dan Produktivitas di Indonesia Tahun 2006-2013.....	37
3.2	Luas Lahan Panen Kedelai Tahun 2010- 2014 (dalam ribu hektar).....	38
4.1	Kewajiban Indonesia Dalam AoA WTO.....	71
4.2	Jadwal dan Besaran Penurunan Tarif, Subsidi Domestik dan Subsidi Ekspor.....	72
4.3	Data Produksi Kedelai Dunia Tahun 2014.....	81

DAFTAR GAMBAR

2.1	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Pertanian Tahun 2004 – 2012.....	24
2.2	Grafik Tenaga Kerja Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2012.....	27
2.3	Grafik Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian.....	28
3.1	Kurva Indeks Luas Panen, Produksi Kedelai, Produktivitas dan Konsumsi Kedelai Tahun 2000-2011.....	36
3.2	Diagram Perkembangan Produksi Kedelai Tahun 2008-2010.....	40
3.3	Peta Daerah Potensi Kedelai Di Indonesia.....	41
3.4	Skema Tata Kelola dan Niaga Kedelai.....	45
3.5	Skema Distribusi Kedelai.....	46
4.1	Diagram Total Ekspor Produk Pertanian Amerika ke Indonesia.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk nomor 4 di dunia, yakni mencapai 237,6 juta jiwa dengan angka pertumbuhan Penduduk yang tinggi mencapai 1,49% per tahunnya, sehingga menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia.² Indonesia juga disebut negara agraris karena kekayaan alam, tanah yang subur, varietas tanaman dan iklim tropis mendukung sektor pertanian yang menjadi pekerjaan sebagian besar penduduk Indonesia. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis karena menghasilkan pangan yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Saat ini pangan merupakan salah satu masalah yang mendapatkan perhatian yang cukup serius tidak hanya pemerintah Indonesia tetapi juga dunia internasional.³

Suatu negara akan berusaha memenuhi semua kebutuhan pangan penduduknya secara mandiri namun jika tidak dapat melakukan hal tersebut maka akan memenuhi kebutuhannya dengan melakukan impor. Indonesia juga melakukan demikian dalam memenuhi ketersediaan pangan bagi rakyatnya, pemerintah berusaha melakukan kemandirian pertanian dalam negeri. Namun, sektor pertanian domestik belum dapat memenuhi kebutuhan nasional karena produktivitas dalam negeri yang rendah⁴ dan Indonesia belum mampu melakukan diversifikasi pangan dengan mudah dan cepat sehingga membuat pemerintah

² Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. *Kependudukan*.

http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=12. diakses 04 April 2014

³ United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan *human security* dalam beberapa komponen yaitu keamanan ekonomi (*assured basic income*), keamanan pangan (*physical and economic access to food*), keamanan kesehatan (*relative freedom from disease and infection*), keamanan lingkungan (*access to sanitary water supply, clean air, and a non-degraded land system*), keamanan sosial (*security of cultural identity*), keamanan individual (*security from physical violence and threat*), dan keamanan politik (*protection of basic human rights and freedom*).

⁴ Jaegopal Hutapea, 2006 . *Ketahanan Pangan dan Teknologi Produktivitas Menuju Kemandirian Pertanian Indonesia*. [http://bto.depnakertrans.go.id/download/Jurnal/KETAHANAN PANGAN DAN TEKNOLOGI PRODUKTIVITAS.doc](http://bto.depnakertrans.go.id/download/Jurnal/KETAHANAN_PANGAN_DAN_TEKNOLOGI_PRODUKTIVITAS.doc). diakses 04 April 2014

melakukan Impor bahan pangan.⁵ Indonesia melakukan Impor terhadap komoditas beras, daging sapi, dan kedelai hingga saat ini yang jumlahnya terus meningkat mengikuti jumlah konsumsi yang terus meningkat.

Kedelai adalah komoditas pangan yang paling banyak diimpor oleh Indonesian dari pasar internasional. Indonesia membutuhkan dua juta ton rata-rata tiap tahun, 90 % diantaranya digunakan sebagai bahan pangan terutama tempe dan tahu, 10 % digunakan untuk bahan pangan lainnya seperti Industri tepung. Total produksi dalam negeri Indonesia kurang mencapai target, hanya mencapai 1 juta ton per tahun, dengan rata-rata produktifitas kedelai hanya sebesar 1,19 ton per hektar dengan areal tanam kurang dari 5% dari total area pangan keseluruhan. Kebutuhan konsumsi Kedelai yang cukup besar di Indonesia menjadikan Kedelai merupakan bahan pangan yang cukup penting di Indonesia.⁶

Produksi kedelai di Indonesia pada 2005 sampai dengan 2014 dapat dikatakan fluktuatif. Pada tahun 2005 produksi kedelai mencapai 808.353 ton. pada 2006, produksi menurun 7,51 %. yaitu menjadi 592.534 ton, Tahun 2008 juga mengalami penurunan 20,74% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2008, terjadi peningkatan produksi 30,91%. Puncak Produksi kedelai di Indonesia terjadi di tahun 2009, yaitu sebesar 974.512 ton. Pada tahun berikutnya yaitu 2010 dan 2011 produksi kedelai turun sebesar 907.031 ton di tahun 2010 dan 851.286 ton di tahun 2011.⁷ Pada 2012, produksi kedelai turun tipis 0,96 persen menjadi 843.153 ton, dari lahan seluas 567.624 hektar.⁸ tahun 2013 yang hanya mencapai

⁵ Mewa Ariani. 2006. *Diversifikasi Usahatani Dan Konsumsi: Suatu Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani*. Monograph Series 27 (2006): 118-121. <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/mono27-7>. diakses 04 April 2014

⁶ M. Hardi. 2010. *Kedelai Merupakan Komodit Terpenting setelah Padi dan Jagung*. <http://repositou.usu.ac.id/bitstream/123456789/19976/5/Chapter201.pdf>. diakses 11 Juni 2014

⁷ Viva News. 2012. *Harga Kedelai Melonjak Tahu Tempe Pun langka*. <http://m.news.viva.co.id/news/read/442738-harga-kedelai-melonjak--tahu-tempe-pun-langka>. diakses 04 April 2014

⁸ Estu Suryowat, 2013. *Ini Penyebab Produksi Kedelai Merosot dalam 5 Tahun Terakhir* <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/07/1900570/Ini.Penyebab.Produksi.Kedelai.Merosot.dalam.5.Tahun.Terakhir>. diakses 16 Januari 2016

779.990 ton. produksi kedelai tahun 2014 mengalami peningkatan 22,3 persen atau sebesar 173.960 ton menjadi 953.960 ton biji kering⁹.

Pemerintah untuk memenuhi defisit konsumsi rata-rata sebesar 1 juta ton pertahun melakukan impor dari pasar internasional. Impor tersebut dilakukan dari beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS), Argentina, Brazil, Malaysia, dan India. Pasokan kedelai impor Indonesia didominasi oleh kedelai yang berasal dari AS dengan menguasai lebih dari setengah dari keseluruhan perdagangan kedelai di Indonesia dengan *market share* sebesar 72%, diikuti oleh Argentina 11%, Brazil 6%, Malaysia 4%, India 1% dan lainnya sebesar 6%. Kedelai impor yang masuk di pasar Indonesia secara umum menyebabkan penurunan produksi kedelai lokal dan turunya daya saing kedelai lokal.¹⁰ Harga yang lebih murah dan suplai yang melimpah menyebabkan kedelai impor banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.

. Krisis kedelai di pasar Indonesia dimulai pada 2005 dan mencapai puncak pada tahun 2008 dimana harga kedelai mencapai dua kali lipat. Hal ini disebabkan berkurangnya suplai kedelai, selain karena produktivitas kedelai domestik yang rendah dan juga akibat kelola tata niaga impor kedelai lokal yang buruk. Tata kelola baik dari sektor hulu baik dari pra panen hingga pasca panen dan hilir yaitu proses dari petani hingga mencapai di konsumen. Krisis kedelai ini berdampak langsung pada pengrajin tahu dan tempe tradisional yang masih bersifat industri rumahan (*home industry*). Krisis ini diperparah dengan sistem perdagangan bebas yang dilakukan oleh Indonesia. Pemerintah menghapus bea masuk 59 produk impor bahan baku pangan termasuk kedelai. Kebijakan penghapusan bea masuk di Indonesia terjadi setelah kesepakatan *Letter of Intent (LoI)* Pemerintah Indonesia dengan *International Monetary Funds (IMF)* pada 1998. Penandatanganan perjanjian tersebut juga diikuti masuknya Indonesia ke dalam organisasi *World Trade Organization (WTO)*. Peraturan WTO

⁹ Astari Fitria Putri, 2015. *Meski Produksi Kedelai Meningkat, BPS: Impor Masih Tinggi* <http://www.beritasatu.com/ekonomi/253485-meski-produksi-kedelai-meningkat-bps-impor-masih-tinggi.html>. diakses 16 Januari 2016

¹⁰ P. Simatupang, Marwoto dan Dewa K.S. Swastika. 2005. *Pengembangan Kedelai dan Kebijakan Penelitian di Indonesia* "Lokakarya Pengembangan Kedelai di Lahan sub-Optimal. Hal 22. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/Anjak_2005_IV_10.pdf. diakses 04 April 2014

mengharuskan Pemerintah meratifikasi peraturan tentang perdagangan bebas pada 1998. Perjanjian WTO tersebut berisi penerapan perdagangan bebas (*Free Trade*) yang salah satu isinya adalah tidak memperbolehkan adanya hambatan perdagangan. Intervensi pasar oleh pemerintah dianggap satu pelanggaran terhadap peraturan WTO.

Untuk mengatasi krisis kedelai di pasar domestik, Pemerintah dengan mengeluarkan Sertifikat Lisensi Impor kedelai. Sertifikasi Lisensi Impor ini adalah surat Keterangan berisi izin untuk melakukan Impor kedelai oleh kementerian perdagangan yang berisi nomor izin dan kuota yang diperbolehkan untuk melakukan impor. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan setidaknya hingga 2014 terdapat 14 perusahaan yang memiliki sertifikat lisensi Impor kedelai. Penerbitan Sertifikat Lisensi Impor ini mulai menimbulkan masalah baru yaitu adanya indikasi kartel¹¹ impor kedelai. Kartelisasi ini terjadi karena hak eksklusif untuk melakukan monopoli impor kedelai kedalam pasar domestik. Pemerintah mencoba untuk mengatasi krisis ini dengan mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan yaitu kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 7000/Kg, namun kondisi dipasaran harga kedelai yang harus dibeli konsumen sudah mencapai Rp 8000/Kg¹².

Kebijakan impor kedelai merupakan tantangan dalam membangun sistem ketahanan pangan. Pemerintah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan yang memberikan amanat kepada pemerintah bersama-sama masyarakat untuk membangun ketahanan

¹¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia kartel berarti organisasi perusahaan besar (negara dan sebagainya) yang memproduksi barang yang sejenis; atau persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditas tertentu (<http://kbbi.web.id/kartel>). Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kartel menggunakan berbagai cara untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka, seperti melalui pengaturan produksi, penetapan harga secara horizontal, kolusi tender, pembagian wilayah, pembagian konsumen secara non-teritorial, dan pembagian pangsa pasar. Akan tetapi perlu pula kita sadari bahwa kartel yang efektif tidaklah mudah untuk dicapai. Bagaimanapun terdapat kecenderungan para pelaku usaha akan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan perusahaannya masing-masing. Dalam hal ini kartel impor kedelai berarti perusahaan yang berusaha mengendalikan peredaran kedelai impor di Indonesia. http://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/draft_pedoman_kartel.pdf. diakses 4 April 2014

¹² Albertus Hendrio Widi. 2013. *Dikuasai Kartel, Tata Niaga Kedelai Bobrok*, <http://DikuasaiKartelTataNiagaKedelaiBobrokKompas.com.htm>. diakses 4 April 2014

pangan guna mencapai stabilitas dan kedaulatan pangan nasional. Suplai pangan dari impor yang cukup banyak dan besar membuat petani lokal menjual hasil panen dengan harga renda dan tidak sebanding dengan biaya produksi petani lokal mengalami kerugian yang cukup besar. Faktor ini juga mempengaruhi petani untuk tidak lagi menggarap lahan dan berubah profesi dan hal ini sedikit banyak mempengaruhi ketahanan pangan nasional yang banyak diisi oleh produk impor¹³

Indonesia memiliki tantangan utama terkait meningkatkan produksi kedelai. Masalah ketersediaan lahan, pembenihan, dan insentif harga yang tidak menguntungkan bagi petani serta harga kedelai impor yang relatif rendah.¹⁴ Pada masa pemerintahan orde baru, pengaturan komoditas pangan dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (BULOG). Badan ini dibentuk khusus oleh pemerintah Orde Baru untuk melakukan monopoli terhadap bahan bahan baku pangan sehingga ketika terjadi kelangkaan bahan tertentu maka pemerintah melakukan intervensi pasar melalui BULOG sehingga harga kembali stabil. Pasca penandatanganan LoI dengan IMF tahun 1998 peran badan ini juga mengalami perubahan tidak lagi bersifat monopolistik dan berubah menjadi jenis perusahaan yang masuk dalam sistem perdagangan WTO, sehingga fungsi dan perannya tidak lagi menentukan.

Ketergantungan Indonesia akan impor kedelai yang didatangkan dari Amerika Serikat Kerap tidak terkontrol, dan itu akan terus berlangsung apabila pemerintah Indonesia tidak mendapatkan solusi. Aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dari pertanian khususnya kedelai apabila hal itu terus berlanjut maka kondisi perekonomian Indonesia akan selalu terpuruk karena selalu tergantung dengan negara lain. Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk memformulasikan permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul : **“Impor Kedelai Indonesia dari Amerika Serikat (Analisis Ekonomi Politik)”**

¹³ Suara pembaharuan. 2012. *Kedelai Potret Ketakberdayaan Negara..* http://www.suarapembaruan.com/ekonomi_danbisnis/kedelai-potret-ketakberdayaan-negara/22868. diakses 04 April 2014

¹⁴ Tia Aprilla, 2013. *Indonesia Harus Impor 1,2 Juta Ton Kedelai.* http://Tribun-News.com/Indonesia_Harus_Impor_1.2_Juta_Ton_Kedelai_Tribunnews.com.htm. diakses 4 April 2014

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan merupakan suatu pembatasan yang bertujuan agar dalam pembahasan semakin terarah dengan pokok permasalahan. Selain itu mempermudah dalam pengumpulan dan pemilihan data maupun informasi. Penulis menggunakan dua batasan yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi berguna untuk menunjukkan lingkup pembahasan suatu fenomena atau objek yang diteliti, yaitu cakupan kawasan atau objek studinya sehingga memudahkan peneliti untuk secara sistematis menganalisisnya. Batasan materi dalam penelitian ini akan dibatasi pada kajian mengenai persoalan dan latar belakang ketergantungan Indonesia akan impor kedelai dari Amerika Serikat.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu menunjukkan tentang waktu terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang akan dianalisis. Batasan waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 untuk mempermudah kajian penelitian. Pemilihan tahun 2008 disebabkan pada tahun tersebut terjadi kenaikan harga kedelai hingga dua kali lipat dan tahun 2013 disebabkan pada tahun tersebut pemerintah melalui kementerian Perdagangan mengeluarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp. 7000/Kg yang merupakan intervensi kebijakan pemerintah pertama untuk kedelai.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah sangat penting dalam sebuah penelitian. Munculnya permasalahan merupakan langkah awal memulai pembahasan dan akan memberikan suatu pusat pemikiran agar pembahasan dan analisa tidak melebar sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang tepat dari suatu persoalan. Bertolak dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah : **“Mengapa Indonesia mengalami ketergantungan impor kedelai dari Amerika Serikat ?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan sebab-sebab Indonesia mengalami ketergantungan impor kedelai dari AS, bagaimana kondisi produksi komoditas kedelai di Indonesia, tataniaga dan para pelaku dalam perdagangan kedelai, serta peluangnya bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kedelai tanpa impor.

1.5 Kerangka Dasar Pemikiran

Teori berfungsi untuk memahami dan memberikan hipotesis secara sistematis. Selain itu, teori dapat menjelaskan maksud dari berbagai fenomena yang terjadi. Jika tanpa menggunakan teori, fenomena tersebut akan sukar untuk dipahami. Di sisi lain, teori juga dapat berupa pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.¹⁵ Menurut Mochtar Mas' oed teori merupakan penjelasan tentang mengapa sesuatu dapat terjadi dan kapan sesuatu akan terjadi. Dengan demikian selain berfungsi sebagai eksplanasi, teori juga merupakan dasar dari suatu prediksi.¹⁶

Penulis dalam menggunakan beberapa konsep dalam karya tulis ini untuk membantu menjelaskan dan menganalisis permasalahan. Pertama adalah kapabilitas sistem politik. Gabriel A Almond dan Powell memberikan adanya 6 kapabilitas sistem politik yaitu kapasitas disini adalah kemampuan sistem politik, yaitu mengenai output (hasil) sistem politik yang mampu memengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Juga berkaitan dengan kondisi dan prestasi pemerintah yang menyebabkan proses pelaksanaan kebijakan umum menjadi efektif dan efisien. Mengenai kemampuan-kemampuan yang dimiliki sistem politik, menurut Almond dan Powel terdapat enam jenis, yaitu¹⁷:

¹⁵ Dahlan Nasution. 1998. *Politik Internasional Konsep dan Teori*. Bandung: Gelora Aksara Pratama. Hal 65

¹⁶ Mas' oed. M, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S. Hal 186.

¹⁷ Gabriel A Almond dan powel dalam thesis Luthfi Sabila, 2015. *Peranan Organisasi Mahasiswa Dalam Pembangunan Politik Daerah (Studi Kasus Kontribusi Organisasi Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Cilacap di Yogyakarta (HIMACITA) periode 2012-2013)* <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t43162.pdf>. diakses 10 November 2015

a. The Extractive Capability

Kemampuan ekstraktif adalah kemampuan sistem politik mengelola sumber sumber kekayaan alam dan potensi-potensi manusia (material and human resources). Kehidupan sistem politik sangat tergantung pada biaya yang dikumpulkan dari kemampuan ekstraktif ini. Pengelolaan kekayaan alam hendaknya berdasarkan azas-azas berikut: azas maksimal, azas lestari, dan azas daya saing.

b. The Distributive Capability

Kemampuan distributif ini sangat berkaitan dengan kemampuan ekstraktif, karena sesudah sistem politik mengelola sumber-sumber kekayaan alam dan potensi manusia, maka sistem politik harus pula menunjukkan kemampuannya mendistribusikan dengan baik kepada seluruh rakyat. Distribusi barang-barang, jasa, kesempatan, status dan bahkan juga kehormatan dapat dilihat sebagai keberhasilan nyata dari sistem politik.

c. The Regulative Capability

Kemampuan regulatif adalah kondisi dimana sistem politik dapat membuat dan melakukan pengawasan terhadap pola dan tingkah laku individu dan kelompok yang menjadi bagian dari suatu sistem politik. Dalam hal ini juga penggunaan kewenangan yang absah untuk melakukan pengawasan terhadap tingkah laku manusia dan institusi yang berada dalam sistem. Bagaimana cara sistem politik membawa kelompok-kelompok atau masyarakat kepada aturan-aturan yang berlaku. Sejauhmana kekuatan aturan aturan tersebut menjangkau dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat serta bagaimana intensitas campur tangan sistem politik terhadapnya, semuanya merupakan ukuran dari kemampuan regulatif ini.

d. The Responsive Capability

Kemampuan responsif adalah kemampuan sistem politik untuk memberikan tanggapan dan penyikapan akan korelasi hubungan antara input (asprasi masyarakat) dengan output (kebijakan pemerintah). Dalam perkembangannya, suatu sistem politik sering menghadapi tuntutan-tuntutan atau tekanan-tekanan yang datang dari lingkungan dalam maupun lingkungan luar.

e. The Symbolic Capability

Kemampuan simbolik adalah mengalirnya secara efektif simbol-simbol nasional dari sistem politik ke dalam lingkungan dalam maupun lingkungan luar sistem. Misalnya simbol-simbol persatuan nasional antara lain seperti bendera nasional, lambang negara, bahasa nasional, lagu kebangsaan, Pancasila dan sebagainya yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

f. Domestic and International Capability

Kemampuan domestik dan internasional menunjukkan keberadaan sistem politik dalam lingkungan domestik (dalam negeri) maupun lingkungan internasional (luar negeri). Sistem politik dalam bekerja, mengadakan hubungan atau interaksi dengan lingkungan domestik dan lingkungan internasional. Karena itu tingkah laku internasional suatu sistem politik bisa dilihat dari segi kemampuan ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik dan responsif internasional sistem politik bersangkutan.

Kedua, Konsep Ekonomi Politik Internasional. Studi ini merupakan studi tentang keterkaitan dan pola hubungan antara politik dengan ekonomi, antara negara dan pasar, antara lingkungan domestik dengan lingkungan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat.¹⁸ Ekonomi Politik Internasional adalah bagaimana cara mendapatkan kekayaan melalui kekuasaan dan adanya interlasi antara pasar dan politik. Hubungan antara ekonomi dan politik ditekankan pada kepentingan nasional karena perhatian besar dari adanya isu-isu tentang kekayaan dan kemiskinan, tentang siapa mendapat apa dalam sistem internasional.¹⁹

Konsep Ekonomi Politik Internasional memiliki pertimbangan dalam *cost and benefit* dimana pemerintahan dari setiap negara harus membuat pilihan-pilihan tentang bagaimana ekonomi domestik dapat selaras dengan ekonomi global. Setiap negara menginginkan adanya keuntungan yang besar bagi negaranya, untuk itu keputusan dan tindakan-tindakan politik dibutuhkan untuk

¹⁸ Mas'ood M, 2003. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar offset. Hal. 4

¹⁹ Robert & Sorensen G. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 228

mencapai kepentingan tersebut.²⁰ Robert Gilpin menjelaskan bahwa negara dalam hubungannya dengan negara lain pasti berkeinginan untuk memenuhi kepentingannya. Hal yang dilakukan untuk mencapai kepentingan tersebut adalah memanipulasi pasar untuk meningkatkan power dan pengaruh.²¹ Ekonomi Politik Internasional mengasumsikan bahwa negara, MNC, dan aktor lainnya menggunakan power yang dimiliki untuk mempengaruhi nature dari rezim internasional. Ekonomi Politik Internasional merupakan dinamika pola hubungan global antara kekuatan (politik) dan kekayaan (ekonomi), yang terdapat hubungan timbal balik diantara keduanya. Ekonomi Politik Internasional sebagai *field of enquiry*, yaitu sebagai suatu subjek permasalahan yang fokus utamanya adalah hubungan (*interrelationship*) antara kekuasaan publik dan pribadi dalam persoalan pengalokasian sumberdaya yang terbatas atau langka.

Kajian Ekonomi Politik Internasional muncul akibat semakin berkembangnya isu-isu yang ada karena meningkatnya kompleksitas dari hubungan antar aktor internasional, terutama dalam hal ekonomi politik internasional. Kajian ini menggeser isu politik tradisional seperti isu perang kepada isu ekonomi, utamanya berbicara mengenai isu kekayaan dan kemiskinan dalam dunia internasional. Isu perdagangan Internasional merupakan salah satu isu yang paling menjadi fokus negara-negara di dunia saat ini. Konsep perdagangan memang telah ada semenjak Adam Smith mengenai *The Wealth Of Nation* yang diperkuat dengan konsep Keunggulan Komparatif David Richardo yang menyatakan bahwa aktor akan mendapatkan keuntungan bila mengkhususkan efisiensi dalam produksi barang tertentu dan untuk mendapatkan keuntungan tersebut tentunya dilakukan dengan perdanganan bebas hambatan.

Perdagangan Internasional saat ini mengacu pada konsep bebas hambatan yang diusulkan oleh Adam Smith dan David Richardo yaitu *free trade* dimana setiap negara harus menghapuskan hal-hal yang bisa menghambat perdagangan. Hambatan ini dapat berupa tarif dan non-tarif .

²⁰ Oatley, T. 2004. *International Political Economy : Interest dan institution in the Global Economy*, London, Longman. Hal 96

²¹ Gilpin, Robert. 2001. *Global Political Economy : Understanding the International Economic Order*. Princeton University Press. Hal. 78

Konsep Perdagangan bebas ini dilakukan oleh IMF jika sebuah negara ingin mendapatkan bantuan dana dari IMF. Semua negara saat ini banyak melakukan peraturan tersebut tidak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia semenjak tahun 1998 menandatangani perjanjian dengan IMF yang berisi *Structure Adjustment Programs (SAP's)* Pemerintah Indonesia harus melakukan Privatisasi, deregulasi dan liberalisasi. Privatisasi adalah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk memiliki ikut mengelola sektor publik. Privatisasi atau swastanisasi secara umum berarti pengalihan kepemilikan BUMN yang dahulunya milik negara kepada privat atau kepada perusahaan swasta.

Privatisasi yang lebih luas tidak hanya penjualan aset publik lewat lelang publik atau penjualan langsung. Privatisasi juga dapat berupa pemberian sub-kontrak dan konsesi dari jasa pemerintah; perjanjian lisensi; kontrak manajemen; perjanjian penyewaan usaha, peralatan atau aset; perjanjian usaha patungan (*joint-venture*); serta skema BOT (*Build-Operate-Transfer*). Di Indonesia Privatisasi dilakukan melalui *Initial Public Offering/ IPO*, pemberian modal langsung (*Direct Placement*), *Management Buy-Out/MBO*.²² privatisasi ini dilakukan kepada Badan Usaha milik negara (BUMN) agar pemerintah untuk mendapatkan dana pinjaman berupa hutang yang digunakan untuk pembangunan dalam negeri. Lembaga pemerintah yang mengalami yang mengalami privatisasi di bidang pertanian adalah Badan Urusan Logistik (BULOG) Perubahan fungsi BULOG yang semula monopolistik terhadap barang pangan salah satunya kedelai menjadi dibebaskan bagi siapa saja pelaku pasar untuk impor.

Deregulasi adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam keadaan tertentu dan kepada sektor tertentu untuk meningkatkan daya saing dalam perdagangan.²³ Deregulasi dilakukan dengan menghapus atau mengurangi pembatasan dalam industri tertentu untuk meningkatkan operasi bisnis dan meningkatkan persaingan. Hal ini biasanya terjadi ketika ada persaingan global

²² Landasan teori, 2015. *Pengertian Privatisasi BUMN Definisi Manfaat Tujuan Sejarah di Indonesia dampak Postif dan Negatifnya* <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-privatisasi-bumn-definisi.html> diakses 16 Januari 2016.

²³ Kamus bisnis, 2016. *Deregulasi* <http://kamusbisnis.com/arti/deregulasi/> diakses 16 Januari 2016

dalam industri.²⁴ Deregulasi dibidang pertanian ini juga berlaku untuk Badan Urusan Logistik (BULOG). Status BULOG yang selama ini Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perusahaan Umum berdasarkan Undang-Undang No. 103 tahun 2001. Undang-Undang tersebut secara tegas bahwa BULOG harus beralih status menjadi BUMN selambat-lambatnya Mei 2003. Implikasinya adalah status BULOG sama dengan perusahaan lain yang melakukan Impor dan harus bersaing secara bebas dengan perusahaan lain. Pemerintah akibat peraturan ini akhirnya mengeluarkan Sertifikat Lisensi Impor dan hingga saat ini sudah terdapat 14 perusahaan yang memiliki sertifikat tersebut namun terindikasi adanya kartel pada sertifikat tersebut, subsidi pupuk juga harus dihapuskan yang selama ini dipegang oleh PUSRI²⁵.

Konsep perdagangan bebas yang diusung dalam konsep liberalisasi pasar dapat dilakukan jika kedua negara memiliki kemampuan ekonomi yang seimbang. Namun, jika Perdagangan bebas yang dilakukan oleh dua negara yang tidak seimbang kekuatan ekonominya akan mengalami eksploitasi dan ketergantungan dalam hal liberalisasi pertanian. Liberalisasi pertanian adalah kondisi dimana pemerintah membuka pasar bebas terhadap sektor pertanian dalam negeri untuk melakukan persaingan secara sempurna terhadap pasar pertanian Global. Liberalisasi pertanian ini juga termasuk proteksi-proteksi domestik seperti subsidi pendukung pertanian. Liberalisasi pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menghasilkan *spill over effect* bagi kondisi pasar komoditas pangan dalam negeri.²⁶ Penghapusan subsidi domestik menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga petani akan menghadapi dilema. Jika harga dinaikkan maka produk tidak akan laku dipasaran dan jika harga tidak dinaikkan maka akan merugi dan tidak memiliki modal untuk penanaman selanjutnya. Fluktuasi harga akibat liberalisasi pertanian sangat ditentukan oleh kekuatan pasar yang diatur dalam

²⁴ Jennifer Francis, 2016. *Economic Deregulation: Definition, Benefits & Example* <http://study.com/academy/lesson/economic-deregulation-definition-benefits-example.html> diakses 16 Januari 2016

²⁵ Suyani Indriastuti, 2010. *Liberalisasi Pertanian dan ketahanan pangan Indonesia dalam Jurnal Sosial Budaya dan Politik*. Jember : LKPK-LKPM Universitas jember. Hal 12-15

²⁶ *Ibid.*

market access yaitu kondisi tarif dan non-tarif, disepakati oleh anggota untuk masuknya barang-barang tertentu ke pasar.

Komitmen tarif untuk barang diatur dalam jadwal masing-masing anggota konsesi atas barang. Jadwal merupakan komitmen untuk tidak menerapkan tarif di atas tarif yang tercantum. Tindakan non-tarif yang diatur dalam perjanjian tertentu WTO. Negara negara anggota berusaha untuk terus meningkatkan akses pasar melalui program WTO dengan melalui negosiasi seperti yang diluncurkan pada Konferensi Menteri Doha pada bulan November 2001.²⁷ Pada tahun 1995 pemerintah yang masuk melalui WTO telah meratifikasi *Aggrement of Agriculture* yang kemudian Pasca 1998 pemerintah menandatangani LoI tersebut membebaskan 59 pos tarif bahan pangan termasuk kedelai. Selain membuka pasar terhadap pelaku pasar lain pemerintah juga diharuskan menghapuskan subsidi terhadap pupuk dan bibit karena dianggap proteksi domestik.²⁸

Sistem pertanian di Indonesia masih belum bisa menerapkan sistem yang efektif dan efisien. Sistem pertanian berkelanjutan yang harusnya dilakukan masih banyak belum dilakukan oleh petani Indonesia sehingga biaya produksi tinggi namun hasil tidak maksimal. Kuota produksi kedelai lokal yang tidak mencukupi konsumsi domestik mengharuskan pemerintah melakukan Impor kedelai dari pasar Internasional dan Indonesia paling besar melakukan Impor kedelai dari AS. Kedelai AS menguasai hampir 72% pasar domestik nasional yang membuat Indonesia tergantung pada AS. Pelaksanaan liberalisasi pertanian dalam negeri Indonesia mengakibatkan petani tidak bisa bersaing dalam produksi kedelai yang disebabkan tidak dapat melakukan produksi secara efektif dan efisien. Hal itu mengakibatkan petani semakin terpuruk sehingga hal itu juga yang mengakibatkan Indonesia setiap tahun harus melakukan impor yang cukup besar atas komoditas kedelai yang jumlah dan harganya cenderung meningkat.

²⁷ World Trade Organization (WTO), 2001. *Market access for goods*

https://www.wto.org/english/tratop_e/markacc_e/markacc_e.htm, diakses 15 Januari 2016

²⁸ Admin SPI, 2011. *Kebijakan penghapusan Bea Masuk Produk Pangan; Babak Kedua Kehancuran Pertanian di Indonesia* <http://www.spi.or.id/kebijakan-penghapusan-bea-masuk-produk-pangan-babak-kedua-kehancuran-pertanian-di-indonesia/>, diakses 15 agustus 2015

Ratifikasi oleh pemerintah Indonesia terutama pada sisi liberalisasi dan deregulasi sehingga pasca tahun 1998 pemerintah melakukan liberalisasi pasar domestik dan juga deregulasi aturan pemerintah berupa privatisasi BUMN selain itu pemerintah juga bergabung kedalam WTO yang memperburuk kondisi pasar domestik dalam negeri. Ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas Letter of Inten tersebut mengakibatkan Indonesia harus merubah kebijakan politik dan ekonomi yang selama ini proteksionis menjadi liberal yaitu dengan melakukan deregulasi dan liberalisasi pasar dalam negeri. Impor kedelai Indonesia kepada AS atas komoditas kedelai merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang mengakibatkan ketergantungan akan komoditas kedelai sehingga mengakibatkan krisis pangan di dalam negeri Indonesia sehingga Indonesia mengalami krisis kedelai.

Faktor pertanian Indonesia yang belum mampu melakukan pemenuhan kebutuhan akan kedelai diperparah dengan adanya sistem tata kelola niaga kedelai akibat sistem perdagangan bebas. Privatisasi BUMN menjadikan BUMN bukan lembaga yang memiliki hak monopoli terhadap komoditas kedelai. Hal ini berakibat adanya aktor lain dalam pemenuhan kedelai dan hal itu menjadikan pemerintah melalui kementerian perdagangan mengeluarkan sertifikat impor kedelai yang diindikasikan membentuk sebuah kartel dalam impor kedelai. IMF merupakan salah satu lembaga donor yang dibentuk oleh negara maju untuk memberikan pinjaman modal lunak jangka menengah dan panjang kepada negara-negara berkembang. Negara yang memiliki modal terbesar dalam lembaga donor ini adalah AS. Kebijakan IMF sedikit banyak akan dipengaruhi oleh AS karena besarnya sumbangan yang diberikan. Pemerintah AS menggunakan IMF untuk membuka pasar

Secara sederhana konsep diatas dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut :



1.6 Argumen Utama

Argumen Utama merupakan jawaban yang diajukan oleh penulis atas rumusan masalah yang diajukan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh penulis maka penulis mengajukan argumen utama yaitu : Indonesia bergantung pada kedelai Impor dari Amerika Serikat karena ada dua faktor yaitu internal dan faktor eksternal. Faktor Internal karena kapabilitas dalam negeri Indonesia di bidang pertanian yang rendah membuat rendahnya kemampuan Indonesia dalam mengelola sumberdaya untuk memproduksi kedelai dalam negeri yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dan secara eksternal karena akibat perdagangan bebas, privatisasi, dan deregulasi sehingga Indonesia harus banyak menyesuaikan tata niaga sektor pertanian dalam negeri terutama kedelai terhadap aturan Internasional yang banyak ditentukan negara negara maju terutama AS.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan dalam suatu penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung pada ketepatan penggunaan dan memilih metode penelitian tersebut. Pengertian metodologi menurut Koentjoroningrat adalah metode (Yunani yaitu *methodos*) yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmiah yang bersangkutan. Dalam penulisan suatu karya ilmiah diperlukan adanya metode yang jelas untuk membantu menganalisa dan menjawab suatu permasalahan. Dalam hal ini, metode penelitian yang akan digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dapat diperoleh oleh penulis dengan metode-metode tertentu untuk mengumpulkan data, baik data primer maupun data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data primer dapat dilakukan melalui proses wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah tersedia. Jenis data yang dibutuhkan dalam penulisan ini dapat berupa artikel, tabel, grafik yang dapat

mendukung argumentasi dari penulis. Dalam memenuhi penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dan dibaca yang di baca melalui metode penelitian kepustakaan (Library Research). Pengumpulan data tersebut diperoleh melalui :

1. Perpustakaan Pusat, Universitas Jember
2. Ruang Baca FISIP, Universitas Jember
3. Surat kabar dan media cetak lainnya
4. Jurnal dan artikel
5. Koleksi pribadi
6. Media Internal

1.7.2 Metode Analisis Data

Untuk mendapat hasil penelitian yang baik, harus menggunakan proses berfikir yang baik pula. Tahap analisis data ditujukan untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dan ilmiah. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif-analisis.²⁹ Dalam mengkaji masalah ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif karena data yang diperoleh tidak dapat diukur secara sistematis-matematis. Data kualitatif hanya bersifat menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan suatu fenomena secara real dan apa adanya. Data kualitatif tidak dikenal istilah populasi tetapi dikenal dengan istilah social situation yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (place), pelaku (actor) dan Aktivitas (activity) yang beraksi secara sinergis³⁰ selain skripsi ini juga menggunakan tabel, diagram dan grafik yang menyajikan data dalam bentuk visual agar mudah untuk dimengerti secara cepat

Dalam penulisan skripsi ini, mayoritas data sekunder yang digunakan berupa pendapat orang dan data pendukung kualitatif lain yang mencerminkan sikap, perilaku, pandangan dan ideologi seseorang yang tercermin dalam berbagai bentuk publikasi, baik cetak maupun elektronik. Berdasarkan data itulah, kesimpulan dalam proses menjawab permasalahan dilakukan.

²⁹ Kartini Kartono. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. Hal 37.

³⁰ Sugiono dalam BAB III Metode penelitian

http://repository.upi.edu/2531/6/S_IPAI_0906378_CHAPTER3.pdf diakses tanggal 6 mei 2016

1.7.3 Pendekatan

Pendekatan adalah cara pandang dalam melihat suatu permasalahan. Dalam Kajian Hubungan Internasional ada dua kenyataan yang dihadapi dalam memahami hubungan internasional. Pertama, kondisi dunia internasional sangat berbeda dengan kondisi internal atau nasional. Dunia Internasional terdiri dari aktor-aktor yang secara hukum memiliki kedaulatan sendiri atau tidak berada dibawah kedaulatan nasional, karena itu mengikuti pada satu kekuatan politik dan hukum yang terpusat. Untuk memahami proses interaksi dan pola hubungan diantara mereka memerlukan analisis yang komprehensif dari aspek politik maupun sejarahnya. Untuk memahami interaksi diantara mereka memerlukan pemahaman yang menyeluruh baik dari aspek politik maupun sejarahnya. Situasi sosial dalam impor ini adalah bagaimana interaksi antar aktor baik di dalam negara berupa institusi/ lembaga, antar negara dan aktivitas yaitu kebijakan kebijakan yang di buat serta proses antar ketiganya Kedua, ilmu Hubungan Internasional membutuhkan pendekatan dan alat tersendiri yang cukup berbeda dengan pendekatan atau cara pandang kajian politik pada umumnya.³¹ Penulis dalam tulisan ini menggunakan pendekatan Ekonomi Politik karena dalam tulisan ini terdapat peristiwa-peristiwa ekonomi dan politik yang saling bersinggungan satu sama lain dan layak untuk diangkat menjadi sebuah karya tulis dan menyumbangkan hal baru bagi dunia akademis.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan, skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, di mana setiap bab terdiri dari sub bab yang saling berhubungan. Kelima bab tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³¹ Saeri, Muhammmad. 2012. *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik* Jurnal Transnasional, Vol. 3, No. 2, Februari 2012

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=31725&val=2274> diakses 24 Januari 2016

BAB II : GAMBARAN UMUM PERTANIAN DAN PANGAN INDONESIA

Bab ini berisi tentang kondisi pangan di Indonesia

BAB III : KAPABILITAS POLITIK PEMERINTAH DALAM SEKTOR PANGAN KEDELAI

Bab ini akan menjelaskan tentang faktor internal penyebab impor kedelai Indonesia atas Amerika Serikat tentang lemahnya kapabilitas

BAB IV : LIBERALISASI PERTANIAN DAN PANGAN DUNIA KHUSUSNYA DALAM SEKTOR PANGAN KEDELAI DI INDONESIA

Bab ini membahas faktor eksternal penyebab Impor kedelai Indonesia atas Amerika Serikat

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang rangkuman dari bab-bab sebelumnya beserta fakta dan argument yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Bab ini menandai berakhirnya penulisan karya ilmiah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERTANIAN DAN PANGAN DI INDONESIA

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis untuk menyokong kesejahteraan nasional. Sektor pertanian selain memproduksi bahan pangan untuk di konsumsi oleh manusia juga sektor yg paling banyak menyerap tenaga kerja karena di Indonesia proses mekanisasi pertanian belum banyak dilakukan di seluruh wilayah dan tetap menggunakan sistem gotong royong yang melibatkan orang banyak. penulis dalam BAB ini akan memberikan gambaran umum mengenai kondisi pertanian dan Pangan di Indonesia

2.1 Gambaran Umum Pertanian Di Indonesia

Pertanian sebagai Sektor Strategis di Indonesia sudah seyogyanya mendapatkan perhatian dari pemerintah karena sumber bahan pangan bersumber dari sektor Pertanian. Sektor pertanian adalah sektor yang mempunyai peran dan fungsi yang strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Namun, sektor ini pula yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah untuk menunjang fungsi dan peran yang strategis itu. Perhatian yang dimaksud adalah proteksi, kredit hingga kebijakan lain yang menguntungkan. Kelemahan sektor Pertanian diantaranya hanya terfokus pada usaha tani, lemahnya dukungan kebijakan makro, serta pendekatannya yang sentralistik. Akibatnya usaha pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak didominasi oleh usaha dengan usaha taniskala kecil dengan modal yang terbatas, penggunaan teknologi yang masih sederhana yang sangat dipengaruhi oleh musim, selain itu wilayah pasarnya lokal dan umumnya berusaha dengan tenaga kerja masih memiliki hubungan keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi), hal lainnya adalah akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah, kondisi pasar komoditi pertanian yang sifatnya mono/oligopsoni yang dikuasai oleh pedagang-pedagang dengan modal besar

berakibat terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani. Dari sisi aturan faktor penghambatnya adalah seperti pembaruan agraria (konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian) yang semakin tidak terkendali lagi, kurangnya penyediaan benih bermutu bagi petani, kelangkaan pupuk padas saat musim tanam datang³²

Indonesia dengan total luas lahan 181 juta hektar (86 persen merupakan lahan pertanian) dan luas lautan diperkirakan mencapai 5,8 juta km² merupakan salah satu potensi untuk mengembangkan sektor pertanian, jika dimanfaatkan secara baik sektor pertanian dapat sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi di masa mendatang. Selain mengembangkan komoditas unggulan untuk tujuan ekspor, output pertanian diharapkan dapat memenuhi kebutuhan domestik (*domestic demand*) dengan jumlah penduduk sekitar 220 juta jiwa. Sektor pertanian merupakan sektor dalam bidang yang menyerap tenaga kerja paling besar dan banyak (rata-rata 44,2 persen), sebagaimana terjadi pula di negara-negara lain seperti Vietnam (67,9 persen), Thailand (57,6 persen) dan Philippina (40,5 persen). Hal inilah yang menyebabkan produktivitas tenaga kerja pertanian jauh lebih rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya, meskipun terus mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan beberapa negara lain, produktivitas pertanian Indonesia juga termasuk rendah, jauh di bawah Philippina dan Malaysia meski relatif sama dengan Thailand.³³

³² Bpp Ismpi, 2009. *Kondisi Pertanian Indonesia saat ini Berdasarkan Pandangan Mahasiswa Pertanian Indonesia*
<http://www.mb.ipb.ac.id/uploads/File/Artikel/2013/mei/Kondisi%20Pertanian%20Indonesia%20saat%20ini%20%E2%80%9CBerdasarkan%20Pandangan%20Mahasiswa%20Pertanian%20Indonesia%E2%80%9D.pdf>. diakses 1 Desember 2015

³³ Halim Alamsyah, 2006. *Laporan Pemetaan Sektor Ekonomi (Sektor Pertanian)*
<http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/FOLDERJURNAL/PetaSektorPertanian.pdf>. diakses 1 Desember 2015

Tabel 2.1 Total Lahan Pertanian di Indonesia Tahun 2009-2013

NO	Jenis Lahan (Dalam Hektar (ha))	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Sawah	8,068,427.	8,002,552.	8,094,862	8,132,345	8,112,10
2.	Tegal/ Kebun	11,782,3	11,877,7	11,626,2.	11,947,9	11,876,88
3.	Ladang/ Huma	5,428,68.	5,334,545	5,697,17	5,262,03	5,272,89.
4.	Lahan Potensial	14,880,52	14,754,24	14,378,5	14,245,4	14,213,8

Sumber : Pusat data dan sistem informasi Kementerian pertanian tahun 2014 hal. 4

Berdasarkan data yang tabel diatas yang diriilis oleh kementerian pertanian perkembangan lahan di Indonesia mengalami penurunan luas yaitu pada sawah sebesar 0,25 % pertahun, kebun 0,59 % pertahun dan lahan potensial sebesar 0,22 %. Peningkatan lahan pertanian hanya jadi terjadi pada ladang/ huma sebesar 9, 10%.³⁴ Luas lahan pertanian di Indonesia sekitar 13 juta hektare. Jika menggunakan asumsi petani 30 juta orang, maka petani hanya mendapat sebatas 0,3 hingga 0,4 hektare. Berdasarkan data pemerintah 3,75 juta hektar sawah atau 52% dari total 7,23 juta hektare areal sawah beririgasi di Indonesia mengamali kerusakan ringan maupun berat, dan hanya 3,48 juta atau 48% diantaranya yang berada dalam kondisi baik. Permasalahan utamanya adalah 76% atau 7,23 juta hektar dari 9,45 sawah di Indonesia mengangandalkan irigasi, sisanya sawah

³⁴ Pusat data dan sistem Informasi kementerian Pertanian, 2014. *Statistik Lahan Pertanian Tahun 2009-2013* http://www.pertanian.go.id/file/Statistik_Lahan_2014.pdf diakses 1 Desember 2015

rawa pasang surut (5%), sawah rawa lebak (2%), irigasi air tanah (1%), dan sawah tadah hujan, irigasi desa, dan ladang.³⁵

Sektor Pertanian yang dianggap Strategis juga tidak memberikan banyak kontribusi dalam pembentukan PDB Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2012 bahkan cenderung menurun.

Tabel 2.2 Kontribusi Subsektor Terhadap PDB Pertanian Tahun 2004 - 2012

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
a. Tanaman Bahan Makanan	50,30	49,79	49,48	48,92	48,81	48,90	48,95	48,56	48,25
b. Tanaman Perkebunan	15,08	15,50	14,63	15,07	14,79	12,99	13,81	14,08	13,42
c. Peternakan	12,35	12,14	11,79	11,32	11,62	12,24	12,11	11,85	12,27
d. Kehutanan	6,16	6,20	6,94	6,67	5,63	5,26	4,90	4,74	4,61
e. Perikanan	16,11	16,38	17,16	18,03	19,15	20,60	20,23	20,77	21,45
Total	100,00								

Sumber : Kementerian PPN/ BAPENAS, Analisis Rumah Tangga, lahan dan Usaha Pertanian Di Indonesia : Sensus pertanian 2013 Hal 13

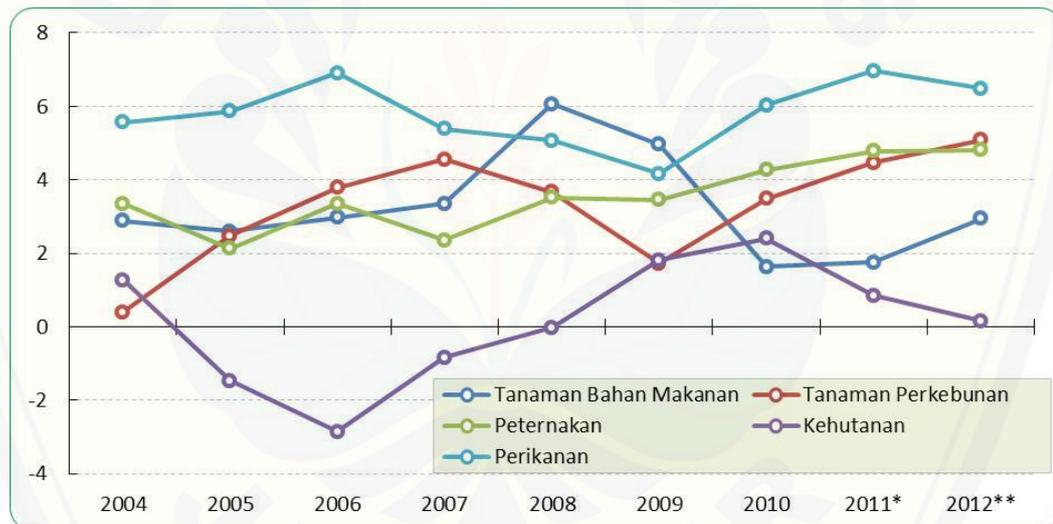
Bila ditinjau dari subsektor pembentuk PDB³⁶ pertanian, hampir dari separuh nilai tambah yang dihasilkan sektor dari sektor ini berasal dari bagian Bahan Makanan. Pada tahun 2004 kontribusinya mencapai 50,30, kemudian menurun menjadi 48,25 persen pada tahun 2012. Meskipun cenderung menurun, subsektor Tanaman Bahan Makanan masih

³⁵ Baheramasyah, 2012. *Tahun 2013 Pangan Harus Bertopang Pada Kemampuan Domestik* <http://infopublik.id/read/29526/tahun-2013-pangan-harus-bertopang-pada-kemampuan-domestik.html> diakses tanggal 15 Januari 2016

³⁶ “Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB). PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dapat diukur dengan harga konstan amupun sementara. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.”

tetap penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB Pertanian. Subsektor Perkebunan mempunyai pola yang sama dengan subsektor Tanaman Bahan Makanan, kontribusinya dalam pembentukan PDB Pertanian juga cenderung menurun. Jika pada tahun 2004 kontribusinya masih sebesar 15,08 persen pada tahun 2012 turun menjadi 13,42 persen. Begitu juga halnya dengan subsektor kehutanan, kontribusinya dalam pembentukan PDB Pertanian juga semakin kecil. Sebaliknya, subsektor perikanan menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Kontribusinya dalam pembentukan PDB pertanian mempunyai tren yang terus meningkat. Pada tahun 2004 kontribusinya sebesar 16,11 persen meningkat.³⁷

Laju pertumbuhan ekonomi dari sub sektor Pertanian juga tidak mengalami kenaikan bahkan cenderung stagnan.



Gambar 2.1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Pertanian Tahun 2004 – 2012

Sumber : Kementerian PPN/ BAPENAS, Analisis Rumah Tangga, lahan dan Usaha Pertanian Di Indonesia : Sensus pertanian 2013 , hal 14

Laju pertumbuhan sektor pertanian secara agregat selama tahun 2004-2012 cenderung stagnan pada kisaran 3-5 persen. Bila dikaitkan dengan target pemerintah yang menetapkan target pertumbuhan sektor pertanian selama periode

³⁷ Kementerian PPN/BAPENAS, 2013. *Analisis Rumah tangga, Lahan, dan Usaha Pertanian di Indonesia* : Sensus Pertanian 2013
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/153634-%5B_Konten_%5D-Konten%20D472.pdf diakses 2 Desember 2015

2010-2014 rata-rata tumbuh sebesar 3.7 persen, target tersebut sepertinya agak sulit tercapai mengingat selama 2010-2012 capaiannya hanya sebesar 3,45 persen. Belum optimalnya capaian pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian merupakan tantangan cukup serius bagi pemerintah mengingat sektor pertanian mempunyai peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional.³⁸

2.2 Gambaran Umum Sektor Pangan Di Indonesia

Pangan merupakan hal penting yang banyak dibicarakan dalam forum internasional karena merupakan kebutuhan pokok di dunia, banyak negara mulai mengantisipasi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Indonesia dalam hal ini juga menjadikan isu pangan sebagai hal penting. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian Khusus terhadap beberapa sektor pertanian strategis karena merupakan makanan konsumsi pokok di Indonesia. Bahan pangan tersebut adakah padi, kedelai, jagung.

Tabel 2.3 Laju Kinerja Sektor Pangan Produktif di Indonesia Tahun 2010-2012

Jenis Produk	Rata-Rata	Realisasi	Realisasi	Realisasi 2012	Rata-Rata
	2010-2012	2010	2011		2010-2012
Padi	3,22	3,22	-1,07	5,00	2,38
Jagung	10,02	3,96	-3,73	9,83	3,35
Kedelai	20,05	-6,92	-6,15	0,04	-4,34
Gula	12,55	-4,74	-1,14	7,62	0,58
Daging Sapi	7,30	6,79	11,40	3,96	7,38
PDB Pertanian	3,7	3,01	3,37	3,97	3,45

³⁸ Kementerian PPN/BAPENAS, 2013. *Analisis Rumah tangga, Lahan, dan Usaha Pertanian di Indonesia* : Sensus Pertanian 2013
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/153634-%5B_Konten_%5D-Konten%20D472.pdf diakses 2 Desember 2015 Hal 14

Sumber : Kementerian PPN/ BAPENAS, Analisis Rumah Tangga, lahan dan Usaha Pertanian Di Indonesia : Sensus pertanian 2013, Hal 15

Pengamatan terhadap perkembangan produksi pada beberapa komoditas komoditas pangan strategis secara umum kondisinya cukup baik dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Namun demikian jika dikaitkan dengan target pemerintah, kecuali produksi daging sapi target tersebut belum tercapai. Untuk Komoditas padi, pemerintah menargetkan selama periode 2010-2014 rata-rata produksinya tumbuh sebesar 3,22 persen, sementara itu realisasinya sepanjang tahun 2010-2012 secara rata-rata hanya tumbuh sebesar 2,38 persen. Capaian produksi jagung juga masih dibawah target yang direncanakan pemerintah, target pemerintah rata-rata tumbuh sebesar 10,02 persen namun realisasinya hanya tumbuh sebesar 3,55 persen. Demikian juga halnya dengan komoditas kedelai dan gula, capaian produksinya masih jauh dari harapan pemerintah.³⁹

Tabel 2.4 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Strategis, Tahun 2008-2012

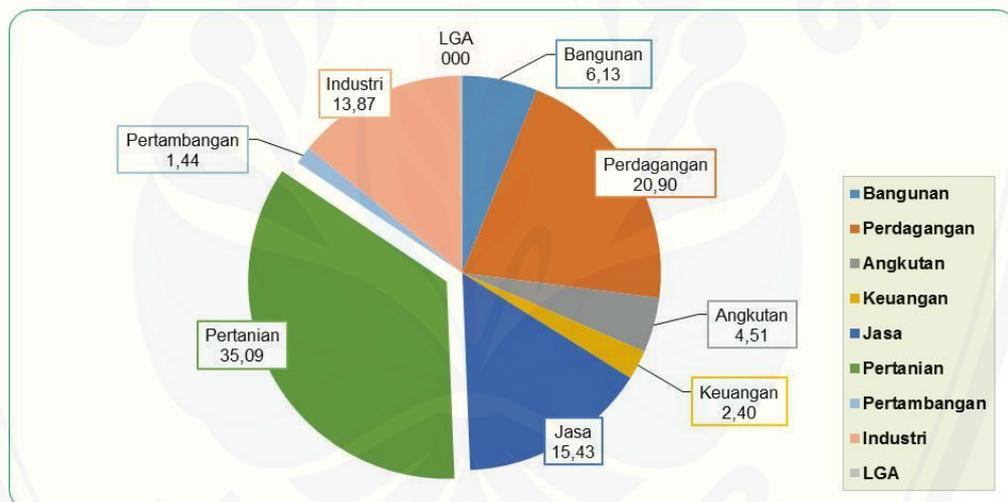
Pangan Strategis	2008	2009	2010	2011	2012
Beras					
Luas Panen (RibU Ha)	11 924	11 839	11 787	12 148	12 327
Produktivitas (Ku/Ha)	45,36	45,74	46,20	47,05	48,94
Produksi (RibU Ton GKG)	54 088	54 151	54 455	57 157	60 326
Jagung					
Luas Panen (RibU Ha)	3 357	3 626	3 346	3 631	4 001
Produktivitas (Ku/Ha)	33,44	34,54	34,70	36,60	40,78
Produksi (RibU Ton Pipil Kering)	11 225	12 524	11 609	13 288	16 318
Kedelai					
Luas Panen (RibU Ha)	565	621	581	459	591
Produktivitas (Ku/Ha)	12,80	13,01	12,88	12,91	13,13
Produksi (Ton Biji Kering)	723	808	748	593	776

³⁹Kementerian PPN/BAPENAS, 2013. *Analisis Rumah tangga, Lahan, dan Usaha Pertanian di Indonesia* : Sensus Pertanian 2013
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/153634-%5B_Konten_%5D-Konten%20D472.pdf diakses 2 Desember 2015 HAL 15

Gula					
Produktivitas (Ku/Ha)	59,50	58,72	51,76	58,84	61,72
Produksi (Ribu Ton Hablur)	2 052	2 242	2 052	2 517	2 694

Sumber : Kementerian PPN/ BAPENAS, Analisis Rumah Tangga, lahan dan Usaha Pertanian Di Indonesia : Sensus pertanian 2013 , Hal 17

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa fluktuasi sumber pangan strategis cukup mengawatirkan. Kondisi diatas menggambarkan hampir semua sektor perdagangan Strategis mengalami stagnansi bahkan penurunan. menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia melakukan impor beras sebanyak 1,8 juta ton, jagung 1,7 juta ton, kedelai 1,9 juta ton, dan singkong 13.300 ton. Ini belum termasuk impor beberapa jenis pangan lain, seperti gula pasir, tepung terigu, biji gandum, dan kentang.⁴⁰

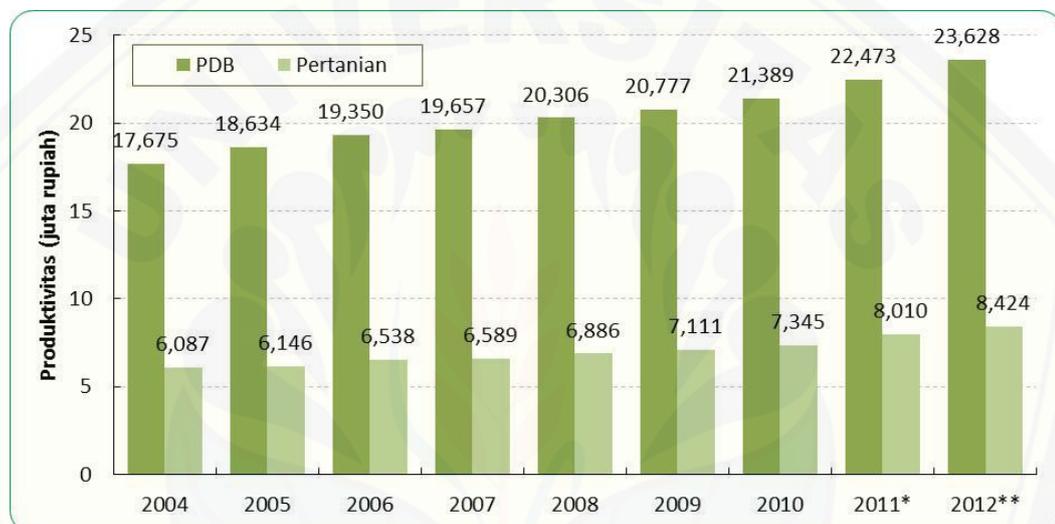


Gambar 2.2 Grafik Tenaga Kerja Menurut Sektor Ekonomi, Tahun 2012
Sumber : Kementerian PPN/ BAPPENAS Analisis Rumah tangga, Lahan, dan Usaha Pertanian di Indonesia : Sensus Pertanian 2013. Hal 16

Meskipun kontribusinya cenderung menurun dalam pembentukan PDB Nasional, namun sektor pertanian tetap merupakan sektor yang cukup signifikan untuk penyangga dalam penyerapan tenaga kerja secara nasional. Pada tahun 2012 terhitung 39,7 juta orang bekerja pada sektor pertanian atau 35,09 persen dari jumlah orang yang bekerja secara

⁴⁰ Taufik Alwie, Anthony, Cavin R.Manuputty, dkk., 2013. *Ironi Negeri Agraris: Padi, Jagung, bahkan Singkong Impor* <http://www.gatra.com/fokus-berita/44363-ironi-negeri-agraris-padi,-jagung,-bahkan-singkong-impor.html> diakses tanggal 10 Desember 2015

nasional. Dapat dikatakan sektor ini cukup menjanjikan jika dibandingkan Sektor ekonomi lainnya seperti sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa-jasa dan Industri Pengolahan. Pada tahun 2012, ketiga sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebesar 20,90 persen; 15,43 persen; dan 13,87 persen. Sebaliknya, sektor pertambangan dan penggalan merupakan sektor yang paling sedikit melakukan daya serap tenaga kerjanya, pada tahun 2012 tercatat hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak sebesar 1,44 persen dari keseluruhan orang yang bekerja secara nasional.⁴¹



Gambar 2.3 Grafik Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Sumber : Kementerian PPN/ BAPPENAS Analisis Rumah tangga, Lahan, dan Usaha Pertanian di Indonesia : Sensus Pertanian 2013. Hal 18

Daya serap tenaga kerja yang tinggi di sektor pertanian pada satu sisi memberikan manfaat yang besar dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan nasional sekaligus menjadi katup pengaman dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia, namun pada sisi yang lain dengan kontribusi dalam PDB yang hanya mencapai 14 persen dan terdapat kecenderungan terus menurun menyebabkan produktivitas tenaga kerja pertanian menjadi rendah. Berdasarkan informasi yang terdapat pada Gambar diatas terlihat bahwa produktivitas tenaga kerja sektor pertanian masih jauh dibawah rata-rata sektor ekonomi lainnya dan

⁴¹ Kementerian PPN/BAPPENAS, 2013. *Analisis Rumah tangga, Lahan, dan Usaha Pertanian di Indonesia* : Sensus Pertanian 2013 http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/153634-%5B_Konten_%5DKonten%20D472.pdf diakses tanggal 2 Desember 2015

perkembangannya sepanjang tahun 2004-2012 tidak banyak mengalami perubahan yang cukup berarti. Pada tahun 2004 produktivitas tenaga kerja pertanian hanya sebesar 6,09 juta rupiah, sementara rata-rata seluruh mencapai 17,67 juta rupiah. Pada tahun 2012 terjadi sedikit peningkatan, produktivitas tenaga kerja sektor pertanian masih jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata sektor ekonomi lainnya. Produktivitas sektor Pertanian pada tahun 2012 sebesar 8,42 juta rupiah dan rata-rata seluruh sektor mencapai 23,63 juta rupiah.⁴²

Secara sederhana, pertanian Indonesia mengalami masalah yang cukup serius dimulai dengan menurunnya lahan pertanian yang berdampak lurus akan terpenuhinya sektor pangan di Indonesia. Pertanian adalah mata pencaharian yang bersifat strategis dan membutuhkan banyak pekerja sehingga dapat mengatasi pengangguran. Tenaga Kerja yang cukup besar di sektor ini ternyata tidak cukup untuk memenuhi target swasembada pangan bahkan sektor pertanian kontribusinya terus cenderung menurun terhadap pendapatan nasional. Target pemerintah juga mleset pada laju pertumbuhan ekonomi subsektor pertanian.

2.3 Kebijakan Pemerintah Dalam bidang Pertanian Tahun 2008-2013

Pada awal pemerintahan SBY tahun 2004, pemerintah sudah menyusun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) selama 20 tahun ke depan. Pertanian merupakan salah satu hal yang disinggung dan akan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang tersebut terdapat sebelas prioritas dan yang jadi prioritas utama adalah reformasi birokrasi dan tata kelola kemudian disusu pendidikan dan penanggulangan kemiskinan, sementara ketahanan pangan berada di nomer lima akibatnya perhatian pemerintah terhadap pertanian sangat kecil. Anggaran yang

⁴²Kementerian PPN/BAPENAS, 2013. *Analisis Rumah tangga, Lahan, dan Usaha Pertanian di Indonesia* : Sensus Pertanian 2013
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/153634-%5B_Konten_%5D-Konten%20D472.pdf diakses 2 Desember 2015 Hal 17

dianggarkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat hanya sekitar 6-7 % APBN dan jauh dari saran Food and Agriculture Organization (FAO) sebesar 20%. Dampak dari hal ini adalah lemahnya perlindungan produsen pertanian yang memiliki usaha skala kecil, meliputi lahan, sarana dan prasarana serta tata niaga. Disisi lain selain produsen, konsumen juga tidak ada memiliki perlindungan terhadap dampak kebijakan dari sisi produsen, dalam kondisi yang sama pemerintah era SBY justru mengandalkan impor pangan untuk memenuhi desifist produksi pangan dengan.⁴³ Selain pemerintah, lembaga negara yang juga ikut andil dalam proses pengambilan kebijakan adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal ini komisi IV.

Komisi IV membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan,. Pada akhir pemerintahan SBY komposisi komisi IV DPR diketuai dari Fraksi PPP, Ahmad Muqowam. Muqowam didampingi oleh tiga wakil ketua, yakni Anna Mu'awanah, Firman Soebagyo, Mohamad Jafar Hafisah. Komisi ini beranggotakan 50 orang dengan pembagian jatah komisi terdiri atas 13 orang dari Fraksi Partai Demokrat, 9 orang dari Fraksi Partai Golkar, 8 orang dari Fraksi PDIP, 6 orang dari Fraksi PKS, 4 orang dari Fraksi PAN. Kemudian 4 orang dari Fraksi PPP, 3 orang dari Fraksi PKB, 2 orang dari Fraksi Gerindra, 1 orang dari Fraksi Hanura.⁴⁴

DPR dalam hal ini komisi IV telah mengesahkan undang-undang pangan yang baru, yakni UU Pangan No. 18 tahun 2012. Dalam Pasal 2 dalam undang-undang pangan ini menyebutkan bahwa pemerintah harus menggunakan prinsip atau asas penyelenggaraan pangan di Indonesia berdasarkan kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, dan keadilan. Secara keseluruhan undang-undang pangan ini memberikan gambaran

⁴³ Muhammad Agung Riyadi, 2014. Potret Buram Kebijakan Pangan Rezim SBY <http://www.gresnews.com/berita/politik/170294-potret-buram-kebijakan-pangan-rezim-sby/0/> diakses tanggal 6 Mei 2016

⁴⁴ Maria Ulfa Eleven Safa, 2009. Daftar Komisi IV DPR RI <http://news.okezone.com/read/2009/10/28/337/270078/daftar-komisi-iv-dpr-ri> diakses tanggal 5 Mei 2016.

bahwa tujuan utama negara adalah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap sumber-sumber pangan dari luar.⁴⁵

Namun di sisi lain, terdapat paradoks dalam Undang Undang ini. pasal 38 dimana terdapat peran dari pelaku usaha pangan yang memiliki sama dengan pemerintah. Hal ini membuka ruang yang luas kepada besar dalam urusan pangan. Padahal yang menjadi pemahaman bersama ini merupakan hal yang sangat vital menyangkut hajat hidup orang banyak kondisi ini dapat dikatakan bahwa pemerintah dan DPR RI tidak bisa memberikan satu definisi yang jelas tentang kedaulatan pangan dan ketahanan pangan yang menjadi topik utama liberalisasi pertanian dan pangan. Permasalahan lainnya dalam UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan ini adalah mengenai impor. Dalam Pasal 36 ayat 1 disebutkan Impor Pangan hanya dapat dilakukan apabila Produksi Pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Dalam tahap ini maka seharusnya impor tidak lagi dijadikan alat pemenuhan kekurangan produksi tapi dijadikan sebagai solusi terakhir jika memang benar tidak bisa namun segera melakukan tindakan untuk mengatasi hal tersebut.⁴⁶

UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan yang baru ini juga menyebutkan mengenai kelembagaan pangan. Banyak kalangan berasumsi bahwa Kelembagaan pangan ini merupakan kelembagaan yang di kontrol oleh pemerintah pusat mulai dari tingkat nasional hingga desa untuk melakukan pengawalan atas kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Salah satu lembaga yang memberikan apresiasi positif adalah Serikat Petani Indonesia (SPI). Dalam hal ini SPI memandang inisiatif kelembagaan pangan ini cukup positif, namun masalah klasik adanya lembaga ini adalah koordinasi antar lembaga baik dari pusat

⁴⁵ Foodreviewindonesia, 2012. Kedaulatan dan Kebijakan Pangan, Poin Utama UU Pangan No. 18 Tahun 2012 <http://foodreview.co.id/preview.php?view2&id=566801#.VzCuJNKLS00> diakses tanggal 6 Mei 2016

⁴⁶ SPI, 2013. Inkonsistensi Kebijakan: Pertanian, Perdesaan dan Agraria <http://www.spi.or.id/inkonsistensi-kebijakan-pertanian-perdesaan-dan-agraria/> diakses tanggal 6 mei 2016

BAB V

KESIMPULAN

Indonesia meskipun sebagai negara Agraris juga mengalami masalah dibidang pertanian dan harus melakukan impor produk pertanian untuk memenuhi konsumsi rakyat Indonesia. Produk yang masih mengalami Impor adalah kedelai. Terdapat beberapa faktor yang membuat Indonesia impor kedelai. Faktor faktor tersebut adalah

- Faktor pertama adalah faktor Internal yaitu ketidakmampuan kapabilitas sistem politik Indonesia untuk memenuhi hal tersebut kapabilitas tersebut adalah kapabilitas ekstraktif, Distributif, Regulatif, Simbolis, Responsif, Internasional dan Domenstik.
- Faktor kedua adalah faktor eksternal yaitu adanya ratifikasi pemerintah terhadap aturan World Trade Organization (WTO) mengenai perdagangan bebas (Free Trade) baik secara Intenasional maupun kawasan regional. Selain itu pemerintah juga melakukan penandatanganan terhadap Letter of Intent dengan International Monetary Funds (IMF) yang mengharuskan Indonesia harus melakukan program penyesuaian struktur (SAP's) yaitu melakukan liberalisasi Pasar produk pertanian, Deregulasi Aturan yaitu perubahan status BULOG dan privatisasi industri pendukung pertanian yaitu menghapuskan susbsidi pupuk oleh PT PUSRI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gilpin, Robert. 2001. *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton University Press.
- Hadi, Syamsul Dkk, 2012. *Kudeta Putih Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam perekonomian Indonesia*. Jakarta. Indonesia Berdikari
- Kartono, Kartini. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Mas'oeed Mohtar, 2003. *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Mas'oeed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Nasution, Dahlan. 1998. *Politik Internasional Konsep dan Teori*. Bandung: Gelora Aksara Pratama.
- Oatley, Thomas. 2004. *International Political Economy : Interest dan institution in the Global Economy*, London. Longman.
- Robert, Jackson & Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Suyani Indriastuti, 2010. *Liberalisasi Pertanian dan ketahanan pangan Indonesia dalam Jurnal Sosial Budaya dan Politik*. Jember : LKPK-LKPM Universitas Jember. Hal 12-15.

Internet

- Admin SPI. 2011. *Kebijakan penghapusan Bea Masuk Produk Pangan; Babak Kedua Kehancuran Pertanian di Indonesia*. <http://www.spi.or.id/kebijakan-penghapusan-bea-masuk-produk-pangan-babak-kedua-kehancuran-pertanian-di-indonesia/> diakses tanggal 15 Agustus 2015.

- Administrator. 2013. *Tanaman Pangan Pertanian*. <http://tanamanpangan.pertanian.go.id/akabi/berita-142-produksi-kedelai-baru-terpenuhi-35-persen.html> diakses tanggal 15 Agustus 2015.
- Alamsyah, Halim. 2006. *Laporan Pemetaan Sektor Ekonomi (Sektor Pertanian)*. <http://www.perpustakaan.depkeu.go.id/FOLDERJURNAL/PetaSektorPertanian.pdf> diakses tanggal 1 Desember 2015.
- Alwie, Taufik, Anthony, Cavin R. Manuputty, dkk. 2013. *Ironi Negeri Agraris: Padi, Jagung, bahkan Singkong Impor*. <http://www.gatra.com/fokus-berita/44363-ironi-negeri-agraris-padi,-jagung,-bahkan-singkong-impor.html> diakses tanggal 10 Desember 2015.
- Anonim, 2013. *Pendahuluan*. <http://digilib.unila.ac.id/6708/13/BAB%20I.pdf> diakses tanggal 15 Agustus 2015.
- Aprilla, Tia. 2013. *Indonesia Harus Impor 1,2 Juta Ton Kedelai*. <http://Tribun-News.com/Indonesia%20Harus%20Impor%201,2%20Juta%20Ton%20Kedelai%20-%20Tribunnews.com.htm>. diakses tanggal 4 April 2014.
- Aria, Pingit. 2013. *Pembebasan Bea Masuk Kedelai Diprotes Petani*. <http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/09/25/092516578/pembebasan-bea-masuk-kedelai-diprotes-petani> diakses tanggal 15 November 2015.
- Ariani, Mewa. 2006. *Diversifikasi Usahatani Dan Konsumsi: Suatu Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani*. Monograph Series 27 (2006): 118-121. <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/ind/Mono27-7> diakses pada 04 April 2014.
- Aryaraja, Azky M. 2012 *Dominasi Amerika Serikat Dalam Perdagangan kedelai Impor tahun 1998-2000*. <http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/631/gdlhub-gdl-s1-2013-aryarajaaz-31548-3.-halam-n.pdf> diakses pada tanggal 15 November 2015.
- Baheramsyah, 2012. *Tahun 2013 Pangan Harus Bertopang Pada Kemampuan Domestik*. <http://infopublik.id/read/29526/tahun-2013-pangan-harus-bertopang-pada-kemampuan-domestik.html> diakses tanggal 15 Januari 2016.
- Berita Bumi. 2015. *Kedelai Impor Transgenik vs Kedelai Lokal Organik: Pertaruhan Kedaulatan Pangan Bangsa*. <http://beritabumi.or.id/kedelai-impor-transgenik-vs-kedelai-lokal-organik/> diakses tanggal 10 Agustus 2015.
- Biro Perencanaan, Sekretariat Jendral. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019* http://www.pertanian.go.id/file/RENSTRA_2015-2019.pdf diakses tanggal 15 Juli 2015.

- BKPM, 2013. *Komoditi Kedelai*.
<http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/commodity.php?ic=2594>
diakses tanggal 19 Desember 2015.
- Bpp Ismpi, 2009. *Kondisi Pertanian Indonesia saat ini Berdasarkan Pandangan Mahasiswa Pertanian Indonesia*.
<http://www.mb.ipb.ac.id/uploads/File/Artikel/2013/mei/Kondisi%20Pertanian%20Indonesia%20saat%20ini%20E2%80%9CBerdasarkan%20Pandangan%20Mahasiswa%20Pertanian%20Indonesia%20E2%80%9D.pdf>
diakses tanggal 1 Desember 2015.
- BPS, 2013. *Kependudukan*.
http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=12 diakses pada 04 April 2014.
- Federation of American Scientist. 2013. *United States Department of Agriculture Indonesia: Long-Term Prospects for U.S. Agricultural Exports*.
<http://www.fas.usda.gov/data/indonesia-long-term-prospects-us-agricultural-exports> diakses tanggal 15 Agustus 2015.
- Francis, Jennifer. 2016. *Economic Deregulation: Definition, Benefits & Example*.
<http://study.com/academy/lesson/economic-deregulation-definition-benefits-example.html> diakses tanggal 16 Januari 2016.
- Hardi, M. 2010. *Kedelai Merupakan Komodit Terpenting setelah Padi dan Jagung*.
<http://repositou.usu.ac.id/bitstream/123456789/19976/5/Chapter%20I.pdf>
diakses tanggal 11 Juni 2014.
- Harianto. 2013. *Kebijakan Impor Pangan*.
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=7297 diakses tanggal 17 Desember 2015.
- Hasibuan, B. A. 2013. *Implikasi Perubahan Status BULOG Dari LPND Menjadi Perusahaan umum (PERUM)*.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26608/3/Chapter%20II.pdf>
diakses tanggal 15 Agustus 2015.
- Hutapea, Jaegopal. 2006. *Ketahanan Pangan dan Teknologi Produktivitas Menuju Kemandirian Pertanian Indonesia*,
<http://bto.depnakertrans.go.id/download/Jurnal/01%20KETAHANAN%20%20PANGAN%20DAN%20TEKNOLOGI%20PRODUKTIVITAS.doc> diakses pada 04 April 2014.
- Ika, Syahrir. 2014. *Kedaulatan Pangan dan Kecukupan Pangan Negara Wajib Mewujudkannya*.
http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_Kedaulatan%20Pangan%20dan%20Kecukupan%20Pangan.pdf diakses tanggal 19 Desember 2015.

- ITS. 2010. *Pendahuluan* <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-18999-Chapter1-2001267.pdf>. diakses 16 Januari 2016.
- Jefriando, Maikel. 2014. *Rachmat Gobel Akui Pengecer Mainkan Harga Kedelai*. <http://finance.detik.com/read/2014/12/23/171201/2785824/4/rachmat-gobel-akui-pengecer-mainkan-harga-kedelai> diakses 10 November 2015.
- Kamus Bisnis. 2016. *Deregulasi*. <http://kamusbisnis.com/arti/deregulasi/> diakses tanggal 16 Januari 2016.
- Kemenperin, 2012. *Swasembada Kedelai Butuh 500 Ribu Hektare Lahan*. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/3882/Swasembada-Kedelai-Butuh-500-Ribu-Hektare-Lahan> diakses tanggal 16 Januari 2016.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia 213/PMK, Oll/2011 tentang Penetapan sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor*. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/213~PMK.011~2011PerLamp.pdf> diakses tanggal 15 November 2015.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Keterangan Pers Revitalisasi Perum BULOG pada Komoditas Kedelai*. http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/SP_18012013.pdf diakses tanggal 15 November 2015.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 133/pmk.011/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/pmk.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor*. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2013/133~PMK.011~2013Per.HTM> diakses tanggal 15 November 2015.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Evaluasi Kebijakan Insentif Bea Masuk Kedelai*. <http://www.kemenkeu.go.id/Kajian/evaluasi-kebijakan-insentif-bea-masuk-kedelai> diakses tanggal; 15 Juli 2015.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.Oll/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang berupa kacang Kedelai* <http://www.tarif.depkeu.go.id/Data/Regulation/PMK1350112012.pdf> diakses tanggal 15 November 2015.
- Kementerian Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2013. *Kalender Tanam Terpadu Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, dan Penerapan* <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/katam/bagian-2.pdf> diakses tanggal 16 Desember 2015.

- Kementerian PPN/BAPENAS. 2013. *Analisis Rumah tangga, Lahan, dan Usaha Pertanian di Indonesia : Sensus Pertanian 2013*. [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/153634-%5B Konten %5D Konten%20D472.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/153634-%5B%20Konten%20D472.pdf) diakses tanggal 2 Desember 2015.
- Kementerian PPN/BAPENAS. 2013. *Analisis Rumah tangga, Lahan, dan Usaha Pertanian di Indonesia : Sensus Pertanian 2013*. [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/153634-%5B Konten %5D-Konten%20D472.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/153634-%5B%20Konten%20D472.pdf) diakses tanggal 2 Desember 2015.
- KominfoNewscenter. 2010. *Potensi Kedelai Pada 15 Propinsi Di Indonesia*. http://www.kominfoNewscenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=938:potensi-kedelai-pada-15-provinsi-di-indonesia&catid=44:nasional-kesra&Itemid=53 diakses tanggal 18 Desember 2015.
- Landasan Teori. 2015. *Pengertian Privatisasi BUMN Definisi Manfaat Tujuan Sejarah di Indonesia dampak Positif dan Negatifnya*. <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-privatisasi-bumn-definisi.html> diakses tanggal 16 Januari 2016.
- Litbang pertanian. 2012. *Kebutuhan kedelai Indonesia Pada Periode 2010 hingga 2014 Rata-Rata Mencapai Sekitar 2,1 Juta Ton Pertahun*. http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/anjak_2012_07.pdf diakses tanggal 10 Agustus 2015.
- Sabila, Luthfi. 2015. *Peranan Organisasi Mahasiswa Dalam Pembangunan Politik Daerah (Studi Kasus Kontribusi Organisasi Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Cilacap di Yogyakarta (HIMACITA) periode 2012-2013)*. <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t43162.pdf> diakses tanggal 10 November 2015.
- Pusat Data dan Sistem Informasi kementerian Pertanian. 2014. *Statistik Lahan Pertanian*. <http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id/> diakses pada 15 Januari 2016.
- Putri, A. Fitria. 2015. *Meski Produksi Kedelai Meningkat, BPS: Impor Masih Tinggi*. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/253485-meski-produksi-kedelai-meningkat-bps-impor-masih-tinggi.html> diakses tanggal 16 Januari 2016.
- Redaksiwebbulog, 2012. *Lisensi Impor Sebaiknya Dimiliki Oleh Negara*. <http://www.bulog.co.id/berita/37/3550/10/8/2012/Lisensi-Impor-Sebaiknya-Dimiliki-Oleh-Negara.html> diakses tanggal 15 Agustus 2015.

- Rofiq, Aunur. 2013. *Menjaga Stabilisasi Harga dan Stok Kedelai*. <http://www.beritasatu.com/blog/ekonomi/2816-menjaga-stabilisasi-harga-dan-stok-kedelai.html> diakses tanggal 15 November 2015.
- Rosalina. 2011. *Pemerintah Didesak Perbaiki Distribusi Pasokan Kedelai*. <http://bisnis.tempo.co/read/news/2011/07/21/090347674/pemerintah-didesak-perbaiki-distribusi-pasokan-kedelai> diakses tanggal 10 November 2015.
- Simatupang, P. Marwoto, dan Dewa K.S. Swastika. 2005. *Pengembangan Kedelai dan Kebijakan Penelitian di Indonesia” Lokakarya Pengembangan Kedelai di Lahan sub-Optimal*. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/Anjak_2005_IV_10.pdf diakses pada 04 April 2014.
- SPI, 2013, Krisis Kedelai di Indonesia; Salah Arah Kebijakan Ekonomi dan Pertanian Indonesia <http://www.spi.or.id/krisis-kedelai-di-indonesia-salah-arrah-kebijakan-ekonomi-dan-pertanian-indonesia/> diakses tanggal 15 November 2015.
- Suara Pembaharuan. 2012. *Kedelai Potret Ketakberdayaan Negara*. http://www.suarapembangunan.com/ekonomi_danbisnis/kedelai-potret-ketakberdayaan-negara/22868 diakses pada 04 April 2014.
- Suryowat, Estu. 2013. *Ini Penyebab Produksi Kedelai Merosot dalam 5 Tahun Terakhir*. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/07/1900570/Ini.Penyebab.Produksi.Kedelai.Merosot.dalam.5.Tahun.Terakhir> diakses tanggal 16 Januari 2016.
- Secretariat General – Ministry of Agriculture 2014. *Statistics of Agricultural Land 2009-2013*. http://www.pertanian.go.id/file/Statistik_Lahan_2014.pdf diakses tanggal 1 Desember 2015.
- Tempo. 2013. *Ekonomi Kedelai 101*. <http://publications.feb.ugm.ac.id/sites/default/files/Artikel%2013%20Ekonomi%20Kedelai%20101.docx> diakses tanggal 15 Agustus 2015.
- Teresia, Ananda, Maria Yuniar, Nafi. 2013. *Komisi Temukan Indikasi Kartel Impor Kedelai*. <http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/09/06/090510898/komisi-temukan-indikasi-kartel-impor-kedelai> diakses tanggal 15 Agustus 2015.
- Viva News. 2012. *Harga Kedelai Melonjak Tahu Tempe Pun langka* . <http://m.news.viva.co.id/news/read/442738-harga-kedelai-melonjak--tahu-tempe-pun-langka> diakses pada 04 April 2014.
- Widi, Albertus H. 2013. *Dikuasai Kartel, Tata Niaga Kedelai Bobrok*, <http://Dikuasai%20Kartel,%20Tata%20Niaga%20Kedelai%20Bobrok%20-%20Kompas.com.htm> diakses tanggal 4 April 2014.

WTO. 2001. *Market Access for Goods*.
https://www.wto.org/english/tratop_e/markacc_e/markacc_e.htm diakses tanggal 15 Januari 2016.

Zuraya, Nidia. 2013. *Produksi Kedelai Indonesia Mampu Saingi AS*.
<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/09/10/mswmoy-produksi-kedelai-indonesia-mampu-saingi-as> diakses tanggal 17 Desember 2015.

